

BAB IV
TIPOLOGI DAN WACANA
KEAGAMAAN PENGAJIAN EKSEKUTIF

A. Beberapa Kajian Utama

Dari telaah terhadap sejumlah naskah dan dokumen materi pengajian serta wawancara dengan beberapa pengurusnya, didapatkan penjelasan bahwa arah dan agenda pengajian diorientasikan pada penumbuhan dan penguatan komitmen ke-Islaman eksekutif Muslim. Komitmen itu perlu dipupuk dan disegarkan agar selaras aktualitasnya dengan dinamika kehidupan global yang kian akseleratif, baik di sektor sosial, ekonomi maupun budaya. Materi-materi yang terepresentasi menyiratkan bahwa eksekutif Muslim berkepentingan terhadap hal itu. Khususnya pada aspek mu'amalah sebagai medium langsung komitmen keagamaan dipraksiskan.

Pada pengajian perdana pada 5 Nopmber 1993 diangkatlah tema "Kebangkitan Islam dan Perkembangan Iptek di Indonesia" yang disampaikan Ir. Azwar Anas. Berturut-turut dari materi yang terkait dengan persoalan SDM meliputi tema "Dimensi Dzikir dan Fikir dalam Bisnis" oleh DR. Qurais Shihab, "Dimensi IPTEK dalam Islam" oleh DR. Ir. Imaduddin Abdurrahim, "Eksplorasi Tenaga Kerja dalam Bisnis" disampaikan oleh DR. Nurcholish Madjid.

Sedangkan berkenaan dengan tema kehidupan global dibawakan Basofi Sudirman, Gubernur Jatim dengan tema "Sikap Muslim dalam Kehidupan Global", dan "Keimanan dan Prediksi Masa Depan" yang disampaikan oleh Ir. Sahirul Alim Msc. Selain itu tim pengurus juga sempat mengundang Prof. DR. Dadang Hawari untuk mendiskusikan topik "Pengendalian diri terhadap Stress".

Dari deskripsi terhadap topik-topik pokok yang dirumuskan pengelola dan dihadirkan para pembicara nampak dua aspek integral; yaitu aspek agama, Iptek dan kehidupan global. Tema-tema itu yang membedakan dengan jenis tema dalam kebanyakan pengajian. Pengajian keagamaan pada umumnya lebih cenderung memperkenalkan tema-tema keagamaan *an sich*, atau lebih sempit lagi pada aspek fiqiyahnya. Dan lazimnya mengulas dimensi *mahdhah* dari tema keagamaan tertentu. Tapi dalam forum eksekutif ini tema-tema itu tampak berusaha tidak ditampilkan. Kalaupun ditampilkan tidaklah sendirian. Tapi dikaitkan dengan persoalan tertentu yang aktual dan tengah menjadi perhatian khalayak luas. Seperti yang dibawakan oleh Dr. Qurais Shihab misalnya, aspek dzikir dikaitkan dengan bisnis.

Tapi topik-topik itu juga tidak menonjolkan teknik semata, sisi teknologinya. Dalam sesi lain implikasi peradaban teknologi dan kapitalisme ditampilkan sebagai tema utama. Dr. Dadang Hawari yang dikenal sebagai psikolog dan pakar kesehatan jiwa secara khusus hadir dengan topik "Pengendalian diri terhadap Stress".

Ada relevansi antara budaya teknologi dengan stress. Kehidupan teknologi di negara-negara Barat yang maju dan identik dengan modernitas ternyata menyimpan potensi destruksi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan cenderung distorsi dari norma-norma sosial maupun agama. Peradaban itu juga menuntut dirubahnya konvensi-konvensi sosial lama komunitasnya untuk digantikan dengan pola budaya dan perilaku baru yang sesuai teknologis. Bahkan akhirnya pola perilaku masyarakat mengikuti tuntutan perubahan perilaku teknologi, bukan sebaliknya. Dalam model demikian terjadi benturan psikis dan nilai sehingga tidak jarang menimbulkan goncangan-goncangan psikososial semacam stress.

B. Benang Merah Wacana Pengajian Eksekutif

Mencermati ruang lingkup bahasan yang disajikan di atas dapat dikatakan, wacana pengajian eksekutif ini bersifat tematik. Agenda dan bahan materi pengajian diangkat dan dikemas berdasarkan tema-tema tertentu. Model tematik pengajian ini lebih fleksibel, variatif dan tidak membosankan. Disampaikan oleh para ahli yang secara khusus dan mendalam menguasai suatu tema keagamaan tertentu, forum pengajian eksekutif nampak lebih marak dan hidup. Bahkan bobot dan substansi persoalan acapkali terkait dan korelatif dengan dinamika mutakhir suatu topik pembahasan.

Dengan begitu pengajian eksekutif menjadi tidak saja menarik, namun juga dapat menawarkan model-model baru sebagai alternatif. Karena pengajian umumnya ternyata tidak sanggup mewartakan kecenderungan kalangan ini. Salah satunya adalah kemasan tema. Tema pengajian lebih menonjolkan dimensi mu'amalah dari ajaran agama. Tapi tidak lantas itu berarti aspek ritualitas tidak disinggung, meskipun tidak secara langsung. Dua hal saling terkait di sini. Pembicara dan topik persoalan. Pemilihan keduanya menjadikan pengajian eksekutif hidup dan marak⁽¹⁾.

Dari figur-figur yang sempat hadir dengan pokok-pokok pikiran yang terdokumentasikan oleh pengurus pengajian eksekutif terdapat beberapa benang merah yang dapat ditarik. *Pertama*, materi yang dikonsumsi lebih menonjolkan dimensi mu'amalah dari ajaran agama. Antara lain meliputi; aspek bisnis, teknologi, isu sumber daya manusia. *Kedua*, aspek etis, moralitas sebagai implikasi teknik dinamika modernitas. Aspek mu'amalah tadi ditinjau dari sisi etisnya, baik bisnis, teknologis maupun dimensi lain yang terkait dengan sosok eksekutif sebagai pelaku dan

¹. Pemilihan topik maupun pembicara dilakukan secara terpadu. Artinya disesuaikan dengan kecenderungan dan keahlian seorang figur. Untuk itu ada dua cara. Pembicara yang dianggap ahli ditentukan dulu, sementara tema disesuaikan dengan keahliannya. Bisa juga sebaliknya, tema diformulasikan, baru kemudian dicarikan pembicara yang memenuhi kriteria tema. Latif Burhan, yang diwawancarai menjelaskan, disamping dua hal tersebut, letak daya tarik pengajian juga karena; aspek penataan forum, penciptaan suasana, tempat pengajian yang asri. Ini karena pengajian esekutif berusaha menjadi alternatif bagi kalangan eksekutif yang minat dan kecenderungan keagamaannya tidak terwadahi dalam pengajian kebanyakan. Untuk suasana pengajian dikondisikan rileks. Tidak ada protokoler dan prosesi-prosesi yang mencerminkan keresmian. Dalam masa-masa mendatang tidak tertutup kemungkinan forum pengajian menyediakan dan dapat dimanfaatkan untuk mensuplai informasi bisnis dan sejenisnya. (wawancara dengan Latif Burhan, tgl. 14 April 1997 di Jl. Diponegoro 94).

pelaksana. *Ketiga*, antisipasi masa depan berkaitan dengan peradaban agama yang diprediksikan bakal diikuti dengan kian longgarnya nilai-nilai dan budaya lokal.

Dimensi mu'amalah itu terkait dengan bidang bisnis sebagai bagian dari sektor riil yang melibatkan kawasan publik. Di dalamnya terkait dengan pasar, persaingan dan suplai. Hampir tidak ada jenis atau model bisnis yang didalamnya tidak mengandung dimensi itu. Bahkan kinerja dan upaya optimal pengembangan bisnis tidak dapat diabaikan penataan di sektor-sektor pendukungnya. Tapi secara filosofis bisnis tidak semata-mata persoalan uang, untung-rugi dan hitungan-hitungan ekonomis belaka. Dalam perspektif pengembangan etika usaha, aspek etis atau moralitas bisnis juga mendapat porsi yang proporsional. Untuk itulah dilakukan peninjauan bisnis dari pelbagai aspek lain agar penilaian itu tepat, obyektif dan netral. Untuk itu saat berikutnya pengajian eksekutif membaca bisnis dari perspektif dzikir dan fikir.

Dzikir dan fikir sebagai dua aktivitas kemanusiaan memiliki dimensinya sendiri. Dzikir lazimnya dimaknai lebih dalam konteks ritualistik, sebagai bagian dari ibadah lisan berupa pengucapan atau pelafalan suatu ayat atau do'a tertentu disertai dengan niat untuk memulyakan Tuhan atau mendo'akan Nabi. Lalu bagaimana kaitan sebenarnya kaitan antara bisnis dengan aktivitas dzikir dan fikir, seperti yang diangkat oleh DR. Qurais Shihab? Berdasarkan naskah itu setidaknya ada beberapa relevansi.

Pertama, Bisnis adalah usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan yang tidak bertentangan dengan doktrin Islam. Terdapat keterangan yang

menjelaskan dalam Kitab Suci maupun Hadits Nabi ikhwal anjuran berbisnis ini. Bahkan Nabi sendiri sebelum masa kenabian adalah seorang wiraswasta. *Kedua*, Alqur'an memerintahkan manusia untuk memperoleh rizki-Nya. Dalam beberapa hadist Rasul juga dijelaskan mengenai do'a-do'a tertentu dalam konteks perolehan rizki.

Do'a itu menegaskan bahwa hasil akhir dari suatu usaha manusia tidak ditentukan oleh dirinya sendiri atau melalui satu pihak saja. Namun di situ menurut Qurais Shihab⁽²⁾, ada aspek "kerja sama" dan keterlibatan keduanya, masing-masing dalam kapasitasnya. Dengan keyakinan adanya taqdir itu maka pelaku bisnis diharapkan tidak berlaku permissif, bisnis yang tidak mengindahkan norma-norma atau etika. Aspek ini urgen bagi kalangan eksekutif muslim, terutama aktor-aktor bisnisnya.

Relevansi naskah yang dipresentasikan oleh Qurais Shihab dalam kaitan pengembangan etika bisnis dapat dicatat beberapa poin. *Pertama*, Alam raya diciptakan untuk kepentingan manusia dan itu wajib disyukuri. Dalam arti, anugerah itu digunakan sesuai dengan tuntutan dan kegunaan penciptaan-Nya. *Kedua*, Allah tidak mengharamkan perolehan dan kecintaan kepada harta (Q.S. Ali Imran; 14). Di situ ada kesadaran terhadap implikasi ikutan harta yang memiliki unsur daya tarik (*appealing*) sehingga menyimpan potensi laten melengahkan dan menjerumuskan pemiliknya. *Ketiga*, Harta benda dan segala yang ada di alam raya adalah milik Allah sedang yang ada di genggamannya manusia adalah amanah-Nya (Q.S. 57; 7, 24; 33). *Keempat*, Mewajibkan fungsi sosial bagi harta benda melalui kewajiban zakat, anjuran

². Makalah Qurais Shihab dalam pengajian Eksekutif pada 23 Pebruari 1994

infaq dan sedekah (Q.S. 9; 34). *Kelima*, melakukan pembatasan-pembatasan bagi perolehan harta dengan menghindarkan perilaku distortif semacam korupsi, riba, pengurangan timbangan dan lainnya. Dan *keenam* penggunaan harta harus terarah, menghindarkan pemborosan, pencatatan hutang-piutang.

Beberapa muatan etis dalam berbisnis itu menjadi tema penting pengajian. Para eksekutif muslim yang terlibat atau menjadi aktor di sektor ini berkepentingan dan bahkan potensial menjadi pilar-pilar penyangganya. Tanpa itu iklim ekonomi bakal menimbulkan distorsi dan deviasi yang menggelapkan ruang publik dunia perekonomian. Integralitas dengan dimensi etis dan konsistensi di wilayah praksisnya, merupakan komitmen ke-Islaman yang dipupuk oleh pengajian di kalangan eksekutif. Dengan itu potensi kemanusiaan itu tumbuh dan berkembang secara utuh dan integralistik.

Tapi era modern itu sendiri menuntut pengkajian lebih dalam dari pelbagai dimensinya. Dimensi ekonomi, sosial, budaya dan tentu saja agama. Aspek-aspek itu menghendaki pemikiran dan pengkajian serius karena dalam sisi-sisi tertentu timbul tuntutan baru baik berupa kemungkinan adaptasi, revitalisasi maupun revisi-revisi yang mungkin dilakukan.

Tema modernisasi umumnya dimaknai secara kaprah sebagai adaptasi terhadap pelbagai hal berkenaan dengan Barat. Modern ala Barat dalam sejarahnya diwarnai oleh proses peminggiran etik agama dari wilayah dunia dan marjinalisasi fungsi-fungsi

strategisnya, maka modernisasi lebih jauh juga menghendaki tidak dilibatkannya unsur agama dalam lingkup sosial, politik maupun ekonomi. Agama sekedar wilayah domestik yang personal dan tidak terkait dengan kehidupan publik yang universal.

Itu cara pandang atau perspektif sekular dalam memandang modernitas. Untuk itu menurut Muhammad Taufiq³⁾, term modern itu harus dikembalikan ke makna asasinya. Awalnya modern lebih bersifat mentalitas. Yaitu sikap dan cara berfikir yang sesuai dengan tuntutan jaman (up to date). Karena agama pada hakekatnya bersifat universalitas, tidak terbatas pada batasan waktu dan lokalitas geografis, maka tentu doktrin-doktrin agama amat maju dan tidak bertabrakan dengan ide-ide progresif mutakhir. Dalam kerangka itu kalangan cendekiawan, juga para eksekutif muslim, sebagai kelompok menengah terdidik memotret arah dan dinamika orbit zaman.

Sebagai sebuah diskursus, modernitas memang mengalami dinamika intrinsik maupun ekstrinsik. Secara intrinsik, adalah obyektif modernitas telah melampau berbagai polemik dan titik krusial ketika diimpor ke negara-negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya di republik ini, babak baru mulai dipancarkan era modern erat dengan sektor ekonomi. Sebuah negara modern dimana stratum sosiologis masyarakat mengalami polarisasi dan diversifikasi fungsi, maka tolak ukur sistem sosial itu berpangkal pada sistem meritokrasi (upah) berdasarkan keahlian dan profesionalisme. Dampaknya ukuran-ukuran tradisional berbau genealogis (keturunan), atau nasab

³⁾ Muhammad Taufiq, Eksistensi Modernisme dalam Agama, Makalah pengajian Eksekutif

(nepotisme), juga sistem favoritisme (berdasarkan suka dan tidak suka) sudah harus ditanggalkan dan diganti dengan ukuran-ukuran kualitatif dan kompetitif.

Dari situ cendekiawan atau para eksekutif sebagai komponen pengambil kebijakan di tingkat masyarakat memiliki standar dan kaidah normatif dalam menggumuli pelbagai praksis riil yang disahuti dan dicari solutifnya. Kehilangan norma akibat benturan nilai lama dengan nilai baru dampak ikutan produk kemutakhiran yang membonceng teknologi relatif tidak terjadi pada cendekiawan muslim.

Karena bagi lapisan ini, teknologi tidak identik dengan kultur rasio semata dan peminggiran agama. Bahkan agama merupakan sandaran maupun basis tak tergantikan dalam meletakkan atau memparameteri produk-produk kebudayaan, sehingga nilai saring (filter) dari doktrin itu menjadi efektif. Meminjam konsep *anomi*, dalam kasus Durkeim⁽⁴⁾, barangkali mirip situasi itu dimana nilai baru yang diharapkan belum kunjung tiba sebagai pengganti terhadap nilai lama yang telah terbongkar. Maka timbullah kekosongan norma dan aturan sosial di tengah masyarakat. Masyarakat mengalami guncangan dan kekosongan nilai dan norma, padahal bentuk-bentuk norma

⁴. Bandingkan dengan konsep Anomi, Mely G. Tan, dalam Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 232. Anomi pada kasus ini digunakan untuk mengungkap tingkat perbedaan *Suicide* (bunuh diri) antara orang Protestan dan Katolik. Pada kelompok pemeluk Protestan ternyata tingkat kemungkinan suicide lebih tinggi ketimbang pemeluk Katholik. Asumsi yang dihasilkan, komunikasi sosial antar pemeluk Katholik lebih interaktif dan harmonis ketimbang Pemeluk Protestan. Antar pemeluk Protestan interaksi sosial itu lebih bersifat organik, jadi sifatnya lebih kaku, prosedural, seperti pola komunikasi pada masyarakat modern. Kurangnya kohesivitas antar kelompok yang diakibatkan proses teknologisasi pada gilirannya menghasilkan hipotesa mengenai potensi timbulnya situasi sejenis.

Dalam melihat stress di kalangan eksekutif, Dadang⁵⁾ lebih lanjut menjelaskan kemungkinan besar tidak terjadi karena penyebab-penyebab yang berkaitan dengan persoalan kekurangan (*lack*) pada dimensi material, seperti karena pengangguran ataupun tiadanya jaminan sosial. Bagi kalangan ini kedua hal itu bukan saja tidak terjadi karena sudah terlewatinya segi-segi dasar dari tingkat kebutuhan, namun pada kalangan tertentu dari kelompok ini dihadapkan pada situasi psikologis yang dilematis antara tuntutan sosial ekonomis yang kian meningkat dan harapan sosial lainnya yang cenderung berlimpah, namun tidak terkait langsung dengan kebutuhan spiritual. Oleh karena itu stress yang terjadi lebih dikarenakan sebab-sebab yang menyangkut implikasi destruktif perilaku sosial yang menyimpang baik karena tingginya tingkat kompetisi dan persaingan bisnis maupun politik yang menuntut aktivitas fisik maupun mental dalam stadium tinggi. Lebih-lebih jika hal itu tidak diimbangi dengan model-model pengaturan ritme aktivitas lain yang tidak teratur dan terencana. Pada kenyataan ini modernisasi dan kemajuan bukan malah menjadi berkah namun sebaliknya justru merupakan pangkal destruksi sosial yang menakutkan.

Pelbagai deretan fakta sosial yang mendera dan meresahkan orang-orang modern dan ternyata rawan menyimpan potensi penyimpangan norma (*abuse of social norm*). Menurut Dadang itu adalah bagian dari fenomena *the agony of modernization*. Yakni hantu psikis yang membayangi orang modern akibat realitas *setting* sosio-kulturalnya yang sudah termodernisasi sedemikian rupa dimana titik tolak

⁵⁾ Makalah Pengajian Eksekutif pada 9 Oktober 1994 di Hotel Mirama Surabaya

pijakan kehidupan sepenuhnya mengagungkan aspek rasionalitas, efektifitas dan kalkulasi-kalkulasi serba matematis sehingga menggeser, bahkan memarjinalisasi fungsi etis eskatologis doktrin agama sebagai sandaran transendental, hal yang secara mendasar tidak dapat dilepaskan dari eksistensial manusia itu sendiri.

Dalam situasi semacam ini, masih menurut Dadang, terdapat dua alternatif pilihan. Pertama, orang modern segera mengembalikan fungsi etis normatif sebagai bagian dari sandaran solusi. Kedua, orang modern tetap pada model pilihan rasionalitas instrumental dengan meminggirkan fungsi etika, namun dengan konsekwensi logis berhadapan dengan kenyataan terjadinya benturan antara tuntutan norma dengan rasio. Pada kenyataan yang terjadi di belahan dunia lain yang telah lebih dahulu mengalami modernitas, pilihan pertama menunjukkan jalan keluar dengan tingkat resiko lebih kecil ketimbang pilihan kedua yang mendogmakan rasionalitas instrumental semata. Lebih dapat ditimbang resikonya karena pada pilihan awal tadi bukanlah tanpa unsur rasionalitas pula. Bahkan tawaran itu bagi Dadang tetap menggunakan instrumen rasio. Agama sendiri toh justru dalam proses penggalan semangat etik dari dogma-dogmanya mengandalkan pula potensi rasionalitas manusia.

Namun di sinilah justru masalahnya acapkali terjadi dilema lanjutan yang tidak kalah rumit. Ketika alternatif itu yang dipilih, agama, atau tepatnya arus umum pemahaman keagamaan yang mendominasi wacana masyarakat setempat belum cukup *feasible* dan fleksibel terhadap dinamika modernitas. Orang modern yang seharusnya

haus akan model-model baru dari spiritualitas agama harus menghadapi kenyataan belum ditemukannya pandangan-pandangan keagamaan baru produk dialogis dengan produk-produk kebudayaan mutakhir. Menurut Moh. Taufiq AB, salah seorang pengarah pengajian eksekutif, bisa jadi perspektif pemikiran keagamaan komunitas tersebut bersifat normatif sentris. Agama ditangkap, dimaknai dan dipersepsikan secara literalis atau harfiah tanpa mengkaitkan dengan problematika riil kemasyarakatan.

Singkatnya, bagi M. Taufiq⁽⁶⁾ yang juga salah satu ketua ICMI Orwil Jatim itu penafsiran keagamaan model demikian masih cenderung tekstual, berdasarkan teks-teks doktrin *an sich*. Di luar itu upaya untuk merelevankan suatu ayat atau ketentuan suci dengan realitas yang terjadi di luar ayat suci itu lazim dikenal dengan penafsiran kontekstual. Oleh karena itu, paparnya, solusi yang ditawarkan masyarakat agama agar realitas kehidupan sosial itu tidak terlepas sama sekali dengan agama maka model pemikiran terakhir barangkali dapat diajukan. Dengan upaya itu, agama tidak terasing dan menjaga jarak dengan dunia ummatnya. Bahkan akhirnya nilai-nilai agama itu membumi dan menukik ke dataran historis. Agama bukan lagi sebagai ajaran yang utopis, mengawang-awang dan *a*-historis

C. Beberapa Tipologi Wacana Keagamaan Pengajian Eksekutif

Dari beberapa benang merah wacana pengajian di atas kiranya dapat ditangkap kecenderungan-kecenderungan yang menonjol dari kemasan materi pengajian yang diarahkan untuk meresponi atau menyikapi suatu soal tertentu yang mengemuka.

⁶. Makalah Pengajian Eksekutif ICMI ORWIL Jatim.

politik islam yang dibayangkan. Wujudnya berupa sistem politik Islam yang ditandai dengan kukuhnya partai politik Islam. Dalam konteks sosial ditandai dengan terekspresinya simbol-simbol ke-Islaman semacam; budaya Islam, dan model-model Islam ideologis yang lain.

Menurut Anwar, wacana model ini dalam sejarahnya mengalami dinamika yang signifikan dengan argumentasi dan logika politik yang lebih konseptual. Pada masa era ideologis, artikulasi pemikiran formalistik tampak pada pandangan M. Natsir⁽⁸⁾ dan tokoh-tokoh Islam lainnya dalam sidang Konstituante pada 1950-an yang mengidealisasikan negara Islam. Artikulasi pesan politik proponen model ini kini semakin konseptual. Syafi'i Anwar menyebut sosok M. Amien Rais A.M. Saifuddin dan Jalaluddin Rahmat sebagai figur kontemporer yang memiliki pandangan formalistik. Pandangan Amien, politik harus ditegakkan atas prinsip-prinsip tawhid. Bila politik lepas dari etika tawhid dan moralitas agama, maka politik akan berjalan tanpa arah dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak.

⁸. Perlu dicatat di sini, penyebutan Formalistik dalam konteks ini tidak dengan sendirinya memberikan penilaian benar atau salahnya. Khusus contoh mengenai keinginan "Partai Islam" era Natsir yang menjadikan Islam sebagai Ideologi Negara tidak dapat dilihat secara sepotong-sepotong, semata sisi negatifnya. Natsir tidak dapat sepenuhnya disalahkan ketika itu. Minimal ada dua alasan. Pertama, masa-masa itu adalah era Ideologi, sehingga seluruh Partai Politik berhak dan absah memperjuangkan Ideologi kepartaian. Kedua, sifat Ideologi PKI yang menginvasi Ideologi-ideologi selainnya. Bahkan menurut Kuntowijoyo, berkah yang dipetik dari era Natsir dengan Ideologi Islamnya adalah adanya tuntutan mengambil jalan tengah dengan dirumuskannya Ideologi Pancasila. (lebih jauh lihat Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Ummat Islam Indonesia, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1994).

Substansialis. Model ini acapkali dihadapkan dengan tipologi formalistik. Berbeda dengan kaum formalis yang menekankan bentuk-bentuk simbolisme ke-Islaman, maka bagi kaum substansialis artikulasi nilai-nilai ke-Islaman itu lebih pada bentuk substansinya. Penganut wacana ini juga kurang percaya pada perjuangan politik Islam. Baginya sosialisasi nilai-nilai berwajah kultural lebih bermakna signifikans ketimbang idiom-idiom Islam ideologis-politis. Nurcholish Madjid⁹⁾ dan Gus Dur sering ditunjuk untuk mewakili kecenderungan model wacana demikian.

Transformatik, yaitu model wacana yang lazim dikenal di dunia LSM (lembaga Swadaya Masyarakat). Titik tekan pemikiran wacana ini berupaya menjadikan doktrin-doktrin normatif ajaran agama sebagai kekuatan yang dapat mentransformasikan pelbagai problematika kemsyarakatan. Dalam dunia LSM, transformasi itu diwujudkan dalam kerja-kerja pengembangan masyarakat (community development). Pilar utama tipologi ini dapat ditengok dalam sosok M. Dawam Rahardjo, Adi Sasono dan M. Amin Aziz. Ketiganya dikenal sebagai aktivis LSM.

⁹⁾ Dalam buku karya Fachri ALi dan Bahtiar Effendy, Cak Nur dan Gus Dur dikategorikan sebagai tokoh neo-modernis. Ini karena pikiran-pikiran kedua figur yang tipikal pluralistik. Mereka bukan saja melihat keragaman sebagai sebuah keniscayaan, namun justru di tengah pluralisme itulah makna Islam hadir sebagai *Rahmatan Lil Alamin*. Dalam konteks nasionalisme, konsep ke-Indonesiaan tidak dapat dipisahkan dari konteks ke-Islaman. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Cak Nur sering menyebut Indonesia sebagai "Muslim Nation", bangsa muslim, untuk tidak menyebut *Islamic State*, negara Islam. Gagasan Gus Dur yang senafas dengan konsep ini adalah "Pribumisasi Islam". Menurutnya Nilai-nilai Islam itu agar membumi dan berpijak pada realitas masyarakat Nusantara, maka perlu dibumikan. (lebih jauh lihat Merambah Jalan Baru Islam, Fachry Ali & Bachtiar Effendy, Mizan, Bandung, 1985) (Untuk dapat melihat lebih utuh pandangan Cak Nur yang tipikal substansial-kultural lihat juga; Nurcholish Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban, Paramadina, Jakarta, 1994)

Dalam bentuknya yang lebih teoritik konseptual, orang juga mengenal Kuntowijoyo dan Moeslim Abdurrahman sebagai figur pemikir yang banyak mencurahkan perhatian pada pengembangan "Ilmu Sosial Transformatif"⁽¹⁰⁾.

Totalistik, sesuai dengan terminologinya, wacana ini melihat doktrin Islam sebagai ajaran yang lengkap, mengadung seluruh dimensi kehidupan, sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Berbagai dimensi ini sepenuhnya dapat dielaborasi dari kanzah Islam sendiri. Tokoh yang sering diidentikkan dengan wacana ini adalah Dr. Fuad Amsyari, Phd.⁽¹¹⁾ Salah satu terminologi keagamaan yang identik dengan tokoh ini adalah term *Islam kaffah*.

¹⁰. Disamping sebagai ekonom, Dawam juga dikenal sebagai intelektual sosial terkemuka. Berkecimpung di dunia LSM. Karir di LSM; pernah menjadi Direktur LP3ES dan Pimpinan Redaksi majalah PRISMA. Demikian pula Adi Sasono dikenal sebagai pendiri HUMAIKA (Himpunan Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan) dan LSP (Lembaga Studi Pembangunan). Sementara itu Kuntowijoyo adalah sejarawan sekaligus budayawan terkemuka. Gagasannya tentang Ilmu Sosial Transformatif adalah bandingan teoritik terhadap ide Moeslim Abdurrahman tentang Theologi transformatif. Bagi Kunto terminologi Theologi Transformatif tidak dikenal dalam kanzah literatur ke-Islaman. Istilah theologi awalnya populer digunakan oleh pemeluk kristiani di Amerika selatan. Jadi, dalam konteks Islam dia diimpor. Oleh karena itu term ini tidak lagi netral. Istilah theologi yang berarti ilmu ke-Tuhanan berarti untuk menamakan sistem kepercayaan (aqidah). Padahal yang diperlukan dalam ilmu sosial dewasa ini tidaklah dalam konteks itu. Melainkan bagaimana ilmu-ilmu sosial itu tidak sekedar sebagai unit penjelas realitas masyarakat, namun juga bagian dari pembentuk realitas itu sendiri, maka ia mesti sanggup menjadi senjata bagi pemeluknya. (lebih jelas lihat Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Mizan, Bandung, 1991, juga Dawam Rahardjo, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa" Mizan Bandung, 1994.)

¹¹. Lebih lengkap uraian Islam "Kaffah"nya Fuad Amsyari ; "Perlu disadari bahwa Islam itu bersifat *kaffah*, untuh mnyangkut segala segi kehidupan termasuk mencari pemecahan segala masalahpun harus berasal dari sumber-sumber Islam. Tidak ada masalah apapun di dunia yang tak dapat dipecahkan oleh acuan Islam. Oleh sebab itu strategi dan taktik adalah bagian dari Islam, baik hal itu berkaitan dengan strategi dan

Idealistik. Pemikiran idealistik dalam kaitan ini, adalah suatu pemikiran yang berorientasi pada terwujudnya kehidupan yang sesuai "cita-cita Islam" ⁽¹²⁾. Islam cita-cita adalah Islam sebagaimana tertuang dalam Kitab Suci dan Hadist Nabi. Perumusan Islam cita-cita ini menurut Syafi'i Anwar adalah untuk membedakan dengan Islam historis, realitas Islam di lapangan. Syafii Ma'arif adalah sosok cendekiawan Muslim yang tipikal idealistik. Schari-harinya adalah Dosen Pascasarjana IKIP Bandung. Ia adalah murid utama Fazlur Rahman, disamping Nurcohlis Madjid.

Realistik. Realistik di sini dimaknai sebagai pemikiran yang berupaya menghadapi antara Islam idealistik atau Islam cita-cita dengan realitas obyektif di tingkat lapangan baik pada dimensi ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan upaya itu ajaran Islam tidak lagi sekedar cita-cita di langit, namun telah membumi, bersatu dengan dunia. Ia bukan *a-historis* namun menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Taufiq Abdullah ⁽¹³⁾ sering ditunjuk untuk mewakili moda ini.

taktik dalam jihad atau strategi dan taktik untuk hidup manusia mencari kebahagiaan lahir-bathin, individu-masyarakat, dan dunia-akhirat. Di sini jelas bahwa upaya pemikiran strategi dan taktik untuk suatu masalah tertentu dalam kehidupan sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam manapun. Tidak boleh ada stratetegi dan taktik dalam kehidupan seorang Muslim maupun kelompok Muslim boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (lebih jelas lihat Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Paramadina, Jakarta, 1995)

¹². Syafi'i Anwar di sini membedakan antara Islam Idealistik dengan formalistik maupun totalistik. Berbeda dengan keduanya, Islam idealistik amat terbuka terhadap dinamika, wacana, interpretasi baru. Pemahaman keagamaan tidak kaku dan tertutup serta tekstual.

¹³. Tulisan Taufiq Abdullah dalam pengantar bukunya Islam, Sejarah dan Masyarakat, menurut Syafii Anwar, telah memposisikan Taufiq dalam model ini. kutipan tulisan tersebut; Sebagai dasar keprihatinan moral dan sumber ikatan solidaritas sosial, Islam tidak saja harus berhadapan dengan faktor-faktor yang berada di luar dirinya- sesuatu

Tipologi ini ditemui pada segmen bisnismen, birokrat dan teknokrat yang kesehariannya mengurus sejumlah realitas di lapangan. Sebagai kelompok yang amat sibuk dengan dan terlibat dalam pelbagai aktivitas bisnis maupun birokrasi acapkali menghadapi mereka pada sejumlah persoalan riil yang terkadang tidak sesuai dengan nilai agama. Hal ini tampak ketika pengajian mengangkat tema Etika Bisnis. Pada sebagian peserta muncul nada pesimisme bahwa etika amat susah dimplementasikan dalam sektor bisnis. Bisnis adalah bisnis, sedangkan etika berkonotasi idealitas, kesucian, kebersihan dan sejenisnya. Logika bisnis mengharuskan mereka memperoleh profit semaksimal mungkin dengan modal sekecil-kecilnya. Mereka juga mengakui bahwa kompetisi di sektor ini acakali tidak sehat.

Yang menarik kendati begitu, solusi yang ditawarkan melihat dua sisi yang vis a vis itu, para eksekutif tidak hitam putih. Walau mereka mengakui tidak mudah mengimplementasikan aspek etika dalam bisnis, mereka tidak lantas membuat keputusan ekstrim, misalnya pindah usaha. Justru sebagian melihat sebagai tantangan.

Kalangan ini juga peduli terhadap kelangsungan aktivitas-aktivitas tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Sebagian mengaku acapkali menyumbang untuk acara-acara insidental yang diselenggarakan oleh Ormas keagamaan. Sebagian yang lain mengaku hingga kini tetap menjadi donatur aktif Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YSDF). Mereka tidak mengabaikan fungsi sosial harta kekayaan.

Mereka juga realistis dalam menilai kualitas SDM umat Islam. Kelemahan umat di sektor ekonomi dewasa ini diakui sebagai bagian tanda dari lemahnya soal SDM itu. Untuk itu perlu penataan pendidikan agar sumber daya manusia itu dapat ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu mereka rela menysihkan dana untuk aktivitas pendidikan. Teknologi juga tidak dapat diabaikan. Ia bagian penting dari identitas masyarakat modern. Mereka tidak mempermasalahkan bahwa teknologi itu berasal dari Barat. Pandangan mereka terhadap pembangunan tidak bertolak dari perdebatan bahwa modernisasi dewasa ini tidak Islami, karena diimpor dari negara sekular. Ada persepsi bahwa modern atau teknologi itu pada dasarnya hanya instrumen untuk memudahkan pelbagai urusan manusia saja. Tinggal manusia sendiri bagaimana memanfaatkan dan untuk keperluan apa teknologi itu.

Seorang peserta pengajian berlatarbelakang dosen ketika diwawancarai berkaitan dengan susahny menegakkan etika bisnis menjelaskan bahwa pada dasarnya bisnis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tentu saja perlu dihindarkan perilaku distortif, seperti curang, korupsi, riba dan lainnya. Dosen ini lebih jauh menjelaskan bahwa agama pada dasarnya tidak melarang orang mencintai harta. Harta harus disyukuri dengan cara membayar zakat, sedekah. Dan penggunaan harta harus terarah dan tidak boros, lanjutnya. Pandangan semacam ini terkesan ideal, melihat suatu kasus dari sisi normatif. Suatu persoalan dibaca dari sudut yang seharusnya. Meminjam tipologi Syafi'i Anwar di atas barangkali kita dapat menyebutnya sebagai *idealis*.

Tapi ketika ditanyakan pada kalangan ini bahwa apa yang mereka ajukan itu lebih berupa pendekatan normatif seorang pengamat, yang tidak terlibat dalam pergulatan di lapangan sebagaimana dialami oleh pegiat bisnis, mereka menjelaskan balik bahwa dalam sisi-sisi tertentu memang kita harus normatif. Artinya walaupun di lapangan ia seorang pegiat bisnis, ekonomi dan birokrat tidak mustahil dapat memberikan batas-batas toleransi penilaian terhadap suatu kasus. Memang tidak harus hitam putih dalam menyikapinya, ya atau tidak. Di situ memang mesti ada kompromi-kompromi itu. Tapi seluruhnya jelas memiliki batas kewajaran. Sebagai seorang profesional mereka harus menjaga kredibilitas dan integritas dari segala yang dapat merusak citra dan image profesi, lanjutnya. Cara-cara tidak sehat dalam aspek apapun pasti akan merusak citra itu. Dari sisi ini mereka terkesan realistik juga.

Tipologi sederhana ini tentu terbuka dan longgar. Bisa jadi ia tidak mencerminkan sepenuhnya kecenderungan atau perspektif mereka dalam melihat dan menempatkan doktrin agama dalam kehidupan praktis. Tipologi itu hanya untuk menggambarkan perbedaan-perbedaan aksentuasi pemikiran dari segmen pengajian yang dikaitkan dengan *background* sosio-ekonominya. Ia tak berpretensi memberikan penilaian terhadap sikap religiusitas seseorang. Antara satu tipologi dengan lainnya tidak serta merta menegaskan tingkat kualitatif bobot keberagamaan seseorang. Karena itu sifat tipologi ini tentatif dan meraba-raba dan terbuka untuk diuji kembali.

D. Modernitas, Problem Alienasi dan Konsep Equilibrium Agama

Tema-tema kajian utama dan wacana intelektual yang mendominasi perbincangan dalam pengajian eksekutif ICMI Orwil Jatim - sebagaimana terpampang dalam Tabel I di atas - menyiratkan tipikal pengajian yang berupaya memadukan dua aspek atau dimensi sekaligus. Yaitu aspek nilai dan dimensi teknisitas. Dua dimensi berbeda itu tampak tak terpisahkan dan tidak ingin dipisahkan dalam forum pengajian, bahkan berhimpitan dan tumpang tindih sebagai dua realitas yang berbeda namun tak terpisahkan. Ditinjau dari teori-teori sosiologi agama, hal itu setidaknya menyisakan dua perspektif dan pendekatan untuk mengurai dan menganalisis tema-tema tersebut. Kedua pendekatan tersebut adalah perspektif dunia yang profan dan dunia yang suci atau sakral.

Profanitas aksentuasi tema pengajian terrepresentasi melalui penggunaan idiom-idiom; teknologi, bisnis, kredit, SDM, fikir, kehidupan global dan prediksi masa depan. Sedangkan tema-tema nilai seperti sikap kaum muslim, dzikir, ke-Imanan dan silaturrahim dapat ditunjuk untuk mewakili kecenderungan nuansa-nuansa ilahiyah, atau dalam konteks ini lebih populer dengan term "yang sakral". Dua sisi itu dalam pengajian eksekutif, tampak didekati secara utuh sebagai sebuah keseimbangan (*equilibrium*). Untuk kepentingan uraian berikut ini, konsep *equilibrium* akan digunakan sebagai jendela untuk menengok secara filosofis problem kemanusiaan modern yang sering dikonotasikan terlalu menekankan satu dimensi saja dalam mendekati pelbagai agenda dan problem kemanusiaannya. Herbert Marcuse, tokoh terkemuka dari mahzab kritis

Frankfurt menyebut manusia modern yang demikian sebagai *one dimensional man*⁽¹⁾, manusia satu dimensi. Term ini dipilih untuk menjelaskan sosok manusia yang di satu sisi amat memuja kekuatan rasio (*cult of rational force*) dan paradigma berfikir ala *idea of progres* yang positivistik, teknokratis dengan kalkulasi-kalkulasi matematis semata. Sementara di sisi lain mengabaikan logika ilahiah, sebagai kekuatan transenden yang mengatasi pelbagai kebutuhan dan keperluan jangka pendek manusia. Karena sifatnya yang adikodrati dari nilai-nilai ilahiah ini, maka ia bersifat "metanarasi" dari yang simbolik. Meminjam bahasa F. O'dea nilai-nilai sakralitas yang mentransendir dunia profanitas itu bersifat *beyond the live*⁽²⁾, di luar jangkauan dunia yang profan.

Dalam peradaban yang dibangun dan ditegakkan di atas nilai-nilai positivistik semata namun mengabaikan yang sakral ini rawan terjatuh dalam krisis. Maka manusia

¹. Lihat, Franki Budi Hardiman, Kesadaran "Yang Tak Bersarang", dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, seri filsafat Driyakarya, Kapita Selecta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, Jakarta, hlm. 113. Untuk term ini sebetulnya Budi hardiman bertolak dari konsep Berger tentang relasi dialektis antara manusia, kebudayaan dan nilai. Seperti diketahui dalam salah satu karya monumentalnya yang telah klasik, *The Secret Canopy* (telah diterjemahkan "Langit Suci" LP3ES, 1992) Peter L. Berger menjelaskan hubungan antara ketiga komponen itu sebagai saling mengisi (dialektis) dengan istilah Eksternalisasi, Obyektivasi dan internalisasi. Pertama, eksternalisasi; manusialah menurut Berger yang melahirkan kebudayaan melalui kreativitas yang berawal dan didorong oleh kekuatan intrinsik dari dalam kediriannya. Namun kebudayaan yang telah dicipta itu akhirnya bersifat otonom dan independent dari manusia itu sendiri meskipun secara obyektif dialah kreatornya. Manusia tidak lagi sanggup mengendalikan sepenuhnya benda dan kebudayaan produk kedirian itu. Benda itu telah mengalami proses obyektivasi. Implikasi dari proses ini, benda kebudayaan itu pada akhirnya menghasilkan model dan warna nilai tersendiri yang diinternalisasikan oleh penciptanya. Melalui proses dialektis inilah benda-benda kebudayaan itu mempengaruhi pola berfikir dan tidak manusia modern.

². Lebih jelas lihat Thomas F. O'dea, Sosiologi Agama, (suatu pengenalan awal), Rajawali Pers, Jakarta, Cet. keempat, 1992).

modern disamping di satu sisi sanggup menciptakan pelbagai kreasi canggih dari kebudayaan mutakhir yang merupakan reproduksi kekuatan rasio yang melahirkan eksese-eksese positif di tingkat teknologi, ekonomi maupun di level sosio-kultural, namun di sisi lain tidak sanggup menghindari terjadinya krisis eksistensial nilai-nilai adikodrati. Orang sering menyebut kehidupan dewasa ini yang modern ditandai dengan proses ter-*alienasi*-nya manusia dari kebudayaan hasil eksternalisasinya sendiri. Kebudayaan modern yang kapitalistik menimbulkan kebingungan tersendiri berupa hilangnya unsur-unsur intrinsik terdalam dari kedirian individu. Ioesin Nasr melukiskan bahwa kebudayaan sekular yang profanitas itu akan dipenuhi dengan manusia-manusia modern yang nestapa, *the plight of modern man*⁽³⁾.

Dinamika kebudayaan yang bertumpu pada teknikalitas belaka sehingga mengarah pada realitas *the plight of modern man* inilah yang dikawatirkan oleh pelbagai kalangan agamawan. Jaques Ellul⁴ yang sering disebut sebagai filosof masyarakat teknologi menyatakan bahwa tehnik bersifat acuh tak acuh terhadap tujuan dan nilai-nilai manusia yang asli, sebab tehnik berubah menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Sementara itu masyarakat teknologi merupakan deskripsi bagaimana teknologi itu

³. Bassam Tibi, Krisis Peradaban Islam Modern, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, hlm. 41

⁴. Manusia dalam masyarakat kapitalis, dimana rasionalitas teknologi menempati tanah suburnya, adalah manusia yang selalu mengorientasikan seluruh aktivitasnya kepada keberlanjutan sistem produksi kapitalisme. Aktivitas manusia yang seharusnya menjadi indikator nilai kemanusiaannya diarahkan kepada sesuatu yang non personal. Akhirnya manusia tidak lagi menyadari dirinya sebagai pusat dunia (world centris). Mereka terpisah dari dirinya dan lingkungannya serta benda-benda komoditinya (lihat *Kompas*, 5 November 1996).

sendiri kini sedang dalam proses mengambil alih dan menyerap seluruh nilai dan tradisi asli dari masyarakat tanpa tersisa, dengan menciptakan suatu kebudayaan tunggal yang tidak memberi tempat pada nilai-nilai non-teknologis.

Fenomena Alienasi

Prediksi bahwa kebudayaan yang lebih mengutamakan nilai-nilai eksternalitas dan mengabaikan nilai-nilai internalitas yang intrinsik akan mengarah pada terbelahnya kesadaran manusia modern antara pemegangan secara mutlak nilai-nilai eksternal itu atau sebaliknya penolakan secara radikal nilai itu sudah lama diprediksikan. Bahkan resistensi kapitalisme yang positivistik itu tidak saja diragukan oleh kalangan intelektual agamawan namun juga oleh mereka yang menentang terhadap agama. Dalam konteks ini terdapat dua tokoh utama yang patut disebut, dimana pandangan-pandangannya terhadap masa depan kapitalisme amat skeptis. Mereka adalah Karl Marx ⁽⁵⁾ dan Emile Durkeim. Antara

⁵. Dalam konteks masyarakat Tanah Air nama Marx acapkali diidentikkan dengan komunisme yang dilarang. Akibatnya membicarakan ajaran-ajaran seringkali dihantui ketakutan dan bayangan subversif. Padahal jika tidak dikaitkan dengan semata-mata ajaran Marxisme (PKI), Marx memiliki kontribusi besar baik dalam gagasan tentang teori-teori kebudayaan maupun kritik kebudayaan. Salah satu pemikiran Marx tentang kritik kebudayaan yang terkenal adalah filsafat pekerjaan. Menurutnya ada empat hal yang menjadikan pekerjaan sebagai aktivitas *sui generis* manusia, sekaligus sebagai pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Pertama, pekerjaan merupakan pemenuhan kebutuhan manusia. Kedua, pekerjaan merupakan realisasi potensi-potensi manusia. Ketiga, Pekerjaan menunjukkn aspek sosialitas manusia, dan keempat manusia melalui pekerjaannya meninggalkan bekas-bekas hasil pekerjaannya. Konsep tentang pekerjaan ini sebagaimana dikutip R. Haryono Iman dari Louis Dupri yang secara khusus melakukan studi falsafi terhadap pemikiran Karl Marx menunjukkan pandangan Mark yang amat maju dan brilian. Karena dari sinilah kemudian proses reproduksi manusia sebagai makhluk sosial dapat dijelaskan. (lebih jauh lihat, R. haryono Iman, *Alienasi Kultural dalam Pemikiran Karl Marx*, dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan,

dan mungkin dapat melupakan segala penderitaan akibat alienasi atau anomie yang dialaminya sehari-hari. Karena itu Karl Marx menyejajarkan agama sebagai candu karena dapat membelokkan kegelisahan seseorang menjadi sesuatu yang menenangkan meskipun- menurut Marx - hanya ketenangan semu.

Di sini Marx telah keliru karena jika agama dapat berkasiat seperti opium yang memberi ketenangan semu, mereka yang mencari ketenangan seharusnya adalah kalangan bawah. Sedangkan yang kaya dan kalangan atas tidak lagi perlu rajin ke Masjid atau Gereja. Tapi kenyataannya justru mereka yang rajin ke Gereja kala itu adalah kalangan menengah atas. Bahkan kalangan bawah sibuk mencari ketenangan melalui minuman keras atau ke perbuatan kriminal agar dapat cepat menyamai kalangan atas dalam hal kekayaan materi. Kalangan menengah atas sudah tidak lagi diburu oleh kerakusan akan materi dan mencoba mengatasi kegelisahan mereka melalui agama. Durkheim juga sependapat bahwa orang-orang yang mengalami alienasi atau anomie tersebut akan mencari penyelesaian melalui berbagai cara dari yang ekstrim hingga ke agama. Yang ekstrim akan bunuh diri. Yang belum berani bunuh diri secara fisis akan bunuh diri secara mental melalui alkohol dan obat-obatan penenang, antara lain candu. Dan sebagian lagi mungkin ke agama. Tapi berbeda dengan Marx, Durkheim tidak menganggap agama sebagai candu, tapi justru sebagai suatu penyelesaian yang lebih positif dibanding dengan jalan bunuh diri, baik fisis maupun non fisis.

Dalam situasi manusia yang sedang bingung, gelisah dan merasa kehilangan jati diri semacam itu dapat saja muncul "agama-agama baru" yang cenderung ekstrim.

"Agama" tersebut diciptakan oleh kalangan yang sudah tidak sabar lagi melihat suasana yang membingungkan tersebut, lalu ingin menyelesaikannya secara revolusioner. Maka muncullah aliran-aliran yang mengajak pengikutnya untuk melakukan bunuh diri secara massal seperti yang dilakukan oleh David Koresh di Texas, Aum Shinrikyu di Jepang dan bahkan yang masih hangat adalah bunuh diri massal sekte Heaven's Gate di Amerika baru-baru ini. "Agama" atau keyakinan baru itu memang tidak selalu diproklamirkan secara terbuka dan terang-terangan sebagai agama, tapi dapat pula sebagai keyakinan duniawi yang ekstrem seperti Neo Nazi dan sejenisnya, yang akhir-akhir ini banyak muncul di negara maju, atau kelompok yang mengklaim anak Tuhan (*children's god*).

Walaupun fenomena ini lebih berakar di negara-negara industri maju (*advanced industrial countries*), tetapi di negara-negara berkembang gejalanya juga sudah mulai nampak, khususnya di kota-kota besar. Yang berbeda mungkin tingkat frekwensi dan eskalasi kualitasnya. Tapi tidak mustahil bahwa gejala tersebut semakin lama semakin besar. Apalagi jika penanganannya tidak tuntas. Hal ini berkaitan dengan kebijaksanaan pembangunan sosial ekonomi politik maupun kebudayaan yang ditetapkan oleh elit-elit masyarakat negara berkembang yang pada umumnya mengadopsi atau mengikuti pola dan arah model pembangunan negara maju yang nota bene sekularistik kapitalistik. Tak terkecuali di negara-negara yang secara kultural-ideologi berbeda, eksese negatif dari paradigma pembangunan ikut mewarnai realitas sosiologis agamis. Bagaimana dengan kemungkinan di Tanah Air ?

Antusiasme Keagamaan

Kehidupan keberagaman di Tanah Air sering disebut sebagai prototipe ideal bagaimana seharusnya model kehidupan pluralitas agama dapat dibangun secara harmonis dan dapat hidup berdampingan secara damai tanpa konflik berarti. Orang-orang Barat yang acapkali muak dengan segala konflik yang bernafaskan agama pada awalnya tidak cukup percaya dengan kehidupan damai di tengah pluralitas agama yang berlainan namun terbukti di Tanah Air, menjadikan mereka harus merenung ulang sikap terhadap skeptisisme mereka. Walhasil mereka melihat masyarakat kita menemukan kedamaian dengan hidup-rukun secara berdampingan dengan agama yang berbeda sekalipun. Bukan hanya itu. Beberapa teori-teori sosiologis yang mencerminkan situasi masyarakat agama di negara-negara maju juga tidak cukup terbukti di Indonesia. Sudah cukup kuat mengakar pandangan yang menegaskan bahwa modernisasi dan kemajuan identik dengan sekularisasi. Artinya di negara manapun di kolong langit ini kalau ingin menerapkan industrialisasi dan modernisasi harus diikuti oleh proses peminggiran peran etik dan fungsi sosial agama dari masyarakat. Dalam masyarakat demikian secara pelan-pelan tapi pasti agama akan kehilangan kredibilitas dan fungsionalitasnya karena akan tergantikan oleh fungsi-fungsi rasio dan teknologi canggih yang sanggup memecahkan pelbagai problem dan misteri yang sebelumnya hanya dapat dipecahkan melalui agama. Perkembangan Ilmu dan teknologi pada akhirnya akan merebut wilayah agama. Maka

dalam masyarakat modern dan maju, sekularisasi seakan sudah menjadi "taqdir sosial" tak terelakkan⁶.

⁶. Terdapat polemik tersendiri terhadap istilah sekularisasi. Nurcholish Madjid menggunakan terminologi sekularisasi sebagai kata kerja aktif yang berbeda dengan makna keterangannya sebagai sekularisme. Sekularisasi menurut Cak Nur berarti "menyekularkan" hal-hal yang sebenarnya sekular murni. Yakni sikap memandang segala jenis hal kebudayaan sebagai dunia yang profan yang sama sekali tidak mengandung muatan-muatan sakralitas. Dengan demikian produk-produk kebudayaan yang sebelumnya karena sejarah, sempat dipandang suci harus dijatuhkan secara radikal ke dalam posisinya yang wajar dan alami. Sementara sekularisme adalah ideologi yang melihat seluruh alam sebagai sekular. Yang sekular itulah yang dapat dipercaya sebagai benar. hal-hal yang tidak tumpang secara empiris dan dapat diukur secara inderawi tidak ada. dan karenanya tidak dapat dianggap sebagai kebenaran. Dalam pandangan ini agama itu tidak obyektif. Ia hanya pantulan dari obsesi-obsesi pemeluknya. Pada ketgori kedua ini sekularisme ditolak. Sebab sebagai ideologi ia hanya tahapan awal dari langkah menuju ideologi atheisme. (lihat Islam, ke-indonesiaan dan Kemodernan, Mizan, Bandung, 1991).

Peter L. Berger memilikiversi tersendiri tentang sekularisasi. Pada awalnya menurut Berger sekularisasi digunakan untuk menyebut proses pengalihan wilayah atau harta milik dari pengawasan para pejabat gereja. Dalam hukum Romawi ia digunakan untuk menamakan kembalinya ke "dunia" orang yang sebelumnya adalah anggota ordo (keagamaan). Sedangkan dalam lingkungan yang nati gereja dan progresif istilah itu telah menjadi simbol pembebasan manusia modern dari kendali religius, sementara dalam lingkungan gereja-gereja tradisional istilah itu dikecam sebagai "de-kristenisasi", "paganisasi". Namun secara umum sekularisasi berarti terpinggirnnya agama dari wilayah publik baik itu ekonomi, politik, budaya dan lainnya. Agama yang telah tesekularkan akan sebatas menjadi urusan privacy yang sama sekali tidak terkait dengan dunia yang digeluti. Ia tidak terlibat dalam urusan-urusan masyarakat baik sebatas sebagai nilai-nilai yang mewarnai maupun sebagai ideologi. Berger juga menyebut dua manifestasi sekularisasi ini, yaitu sekularisasi obyektif dan subyektif. Obyektif sekularisasi yang terjadi pada level sosio-kultural ekonomi dimana telah menjadi kenyataan bahwa agama sama sekali tidak ikut memberi warna atau panduan dalam proses-proses di level kehidupan obyektif tersebut. Sementara sekularisasi subyektif berarti kesadaran individu telah tersekularkan, yakni ketika individu diliputi ketidakpastian keagamaan. Karena itu manifestasi ini biasa juga dikenal sebagai sekularisasi kesadaran atau sekularisasi penalaran. (lebih lengkap lihat Peter L. berger, The Secret Canopy / Langit Suci, LP3ES, Jakarta, 1992, hlm. 151.

Namun jika mencermati fenomena religio-kultural masyarakat tanah Air, setidaknya untuk hari-hari ini, asumsi-asumsi teoritik akan terjadinya situasi serupa dengan yang terjadi di negara-negara Barat belum terbukti. Bahkan sebaliknya fenomena belakangan ditandai dengan maraknya kehidupan keagamaan ⁽⁷⁾. Indikatornya dengan mudah dapat diidentifikasi. Melubernya jamaah-jamaah sholat di bulan Puasa, kian banyaknya orang naik haji, bermunculannya masjid-masjid, Musholla-musholla dan tempat ibadah di kantor-kantor birokrasi, pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat eksekutif lainnya, berdirinya forum-forum pengkajian ke - Islaman di pelbagai kalangan, kian religiusnya tampilan para pejabat dan birokrat dan lainnya, merupakan bagian sedikit

7. Optimisme dalam melihat potensi ummat Islam sebagai pendorong utama gerakan Intelektual dunia antara lain tampak pada pemikiran Robert W. Hefner. Sebagai seorang Indonesianis terkemuka yang simpatik pada kelahiran ICMI, analisis-analisis Hefner boleh dibilang paling respek dengan ummat Islam Indonesia ketimbang Indonesianis yang lain semacam Liddle, Anderson maupun yang lainnya. Bagi Hefner Islam di Indonesia menyimpan beberapa keunikan yang khas dan berbda dengan umumnya negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam. Keunikan itu terletak pada model keberagamaan yang lunak, dalam arti mderat dan tidak terlibat dalam konflik-konflik keras antar sekte pemeluk mazhab seperti terjadi di negara-negara Islam di Timur Tengah. Juga terletak pada domestifikasi wilayah ke-islaman dengan wilayah lokal sehingga Islam nyaris tidak dapat dipisahkan dengan dimensi ke-Indonesiaanya. Antara di satu sisi Islam memiliki korelasi dengan geografis. Padahal jika dilihat Islam sebagai agama universal yang tidak mengenal batas geografis dan wilayah negara, maka logikanya dengan domestifikasi nilai-nilai ke-Islaman yang berpadu dengan wilayah Tanah Air maka akan mereduksi Islam sebagai ajaran yang lokalistik dan tidak universal. Namun nyatanya hal itu tidak terjadi, bahkan sebagai ajaran universal islam di negeri ini memiliki muatan khas yang amat religius. (lebih jauh untuk tema-tema serupa sebenarnya telah diintroduksi oleh pemikiran Nurcholish Majdid, lewat konsep *Muslim nation*-nya yang membedakan dengan konsep *Islam state*, lihat, Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina, Jakarta, 1992) Sebagai Muslim Nation diartikan bahwa dilihat secara sosio-kultural, tidaka dapat doitolak kenyataan bahwa warga negara terbesar bangsa kita adalah ummat Islam. Disamping juga warna kebudayaan yang paling banyak mewarnai dalam konteks kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Tidak disebut sebagai *islamic State*, karena secara ideologis bangsa kita tidak berdasarkan pada Islam.

Berbicara agama sebagai identitas memang ada kebangkitan. Namun agama sebagai identitas cenderung sebagai sumber konflik. Di lain pihak jika orang melihat agama sebagai spiritualitas, maka agama yang memang sudah lama mengalami kemunduran, terasa semakin merosot. Di sinilah kita harus waspada bahwa meningkatnya jemaah Masjid yang terjadi di kota-kota besar selain menggembirakan juga menjadi tanda tanya jangan-jangan telah terjadi alienasi dan anomie di masyarakat kota Indonesia. Sebab selain makin banyak yang ke Masjid, juga tidak sedikit diantara masyarakat yang melarikan diri ke minuman keras, perjudian, obat-obatan terlarang, tindak kriminal dan perkelahian massal. Sebagaimana juga terjadi pada masa Marx dan Durkheim mereka yang sekarang cenderung mencari suka bathin ke agama terutama adalah kalangan menengah ke atas. Kalangan bawah tidak melihat bahwa agama tidak akan dapat menenangkan kegelisahan mereka yang sebagian bersumber pada kesulitan ekonomi. Kalangan ini lebih menyukai penyelesaian materi lewat judi, minuman keras atau tindakan kriminal. Kalangan menengah ke atas dan para konglomerat yang masih juga disibukkan oleh kerakusan materi umumnya datang dari mereka yang tidak pernah mendapatkan pendidikan tentang nilai atau agama. Mereka tidak tahu batas mana yang patut dan tidak patut. Pada kalangan ini sendainya rajin datang ke tempat-tempat ibadah, hal itu terkesan lebih bertujuan mengejar dampak politisnya daripada kepada penghayatan akan tata nilai yang terkandung di dalamnya.

Agar religiusitas masyarakat kita yang kini tengah memasuki masa industrialisasi itu tidak sekedar simbolitas namun benar-benar menyentuh dimensi terdalam dari ajaran

agama, maka kegiatan keagamaan mesti diarahkan secara benar dan intensif tidak saja sekedar melalui kutbah-kutbah jum'at atau pengajian semata, tapi juga kegiatan nyata yang menyentuh langsung lapisan atau kelompok-kelompok yang mengalami alienasi secara ekonomi. Kegiatan nyata yang dapat mencegah agar kegelisahan mereka tidak diselesaikan lewat minum-minuman keras, tindak kriminalitas serta kegiatan ekstrim lainnya. Kegiatan nyata tersebut jangan hanya mengingatkan mereka yang sedang gelisah akan masalah moralitas dan dosa, tapi juga kegiatan yang benar-benar memberikan suka bathin secara kongkrit.

Dengan kegiatan yang langsung menyentuh dan memberikan makna signifikansi secara ekonomi maupun makna sosial di tengah kegelisahan sebagian kalangan itu akan menunjukkan bahwa Islam benar-benar agama yang dapat menjembatani kesenjangan sosial ekonomi pemeluknya. Islam adalah agama yang tidak mengenal feodalisme, perbedaan kelas yang didasarkan pada posisi dan kekayaan duniawi dan mampu mengangkat mereka yang tertinggal atau terlupakan sehingga mereka tidak lagi merasa terasing atau kehilangan jati diri. Islam bukanlah agama yang hanya mencoba menyelamatkan manusia yang menekankan penyelamatan diri pribadi sebagai individu, tapi juga agama yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam hidup bermasyarakat yang merasa gelisah, mengalami alienasi dan anomie. Selama ini, secara rethorik melalui kutbah-kutbah hal tersebut selalu diungkapkan. Tapi seandainya ajaran-ajaran tersebut tidak sekedar ditampilkan dalam kutbah barangkali sekarang tidak ada lagi manusia Indonesia yang gelisah karena mengalami alienasi dan anomie yang menghantarkan

mereka terjatuh pada minum-minuman keras, tindak kriminalitas, mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau mengejar materi melalui berbagai cara kriminal sekalipun seperti cara-cara korupsi, manipulasi dan kolusi.

Sebagai kalangan eksekutif dan pemuka ummat yang memiliki tanggungjawab moral maupun sosial intelektual memikirkan nasib ummat, sudah bukan saatnya kalangan ini melihat kekurangan dan kesenjangan ekonomi ummat dengan menyalahkan orang lain. Atau menyalahkan pemerintah dan menyalahkan kaum konglomerat. Apalagi menyalahkan pemeluk agama lain. Yang harus dilakukan adalah melakukan koreksi terhadap diri sendiri dan melakukan kegiatan nyata. Ketika melihat masih banyak masyarakat mencari tempat suaka bagi bathinnya, adalah kesempatan baik untuk mengukuhkan kembali keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar-benar mampu memberi keteduhan bagi semua orang. Bukan hanya kalangan eksekutifnya atau mereka dari lapis menengah atas, tapi juga kalangan bawah. Dengan begitu tidak alasan bagi mereka untuk gelisah, merasa terasing dan kehilangan jati diri. Hal itu secara konseptual dapat diawali dengan memahami Islam itu sendiri secara utuh, sebagai ajaran yang menyeimbangkan antara kepentingan duniawi yang profan dan ukhrowi yang sakral. Pengajian eksekutif yang secara tematik berusaha menwarkan diri sebagai wahana pengkajian yang tidak eksklusif, parsial, dan tidak berisi kutbah-kutbah sloganistis berdimensi sakral semata namun melupakan yang dunia, setidaknya dapat menjadi potret dari wahana lain bagaimana semestinya Islam ditampilkan dalam bentuk wajahnya yang utuh, bulat dan tidak lonjong apalagi bopeng. Semoga.